



Kuasa Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah: Oligarki, Premanisme dan kekuatan Lokal

Muhtar¹, Atikah Khairunnisa², Joana Tuhumury³

Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Pattimura^{1,2,3}

*Email Korespondensi: muhtartisipunpatti@gmail.com

Diterima: 13-10-2025 | Disetujui: 23-10-2025 | Diterbitkan: 25-10-2025

ABSTRACT

This study explores the relationship between money power, oligarchy, thuggery, and local power in regional head elections, which collectively form a transactional patronage network. Drawing on Oligarchic Power Theory (Winters, 2011), this study shows that oligarchs use wealth to dominate politics, both in campaign funding and post-election policy influence. Coercive Clientelism (Wilson, 2015) explains that thuggery functions as a tool for mass mobilization, intimidation of political opponents, and securing votes in certain areas, strengthening the dominance of local elites. Furthermore, Berenschot (2018) identifies village heads and local figures as mediators in the distribution of money politics, which plays a crucial role in strengthening patron-client relationships at the grassroots level. This phenomenon supports clientelism theory, where money power is the primary link between oligarchs, candidates, and local communities. This study also reflects the plutocracy trap (Winters, 2011), where wealth is used to control public policy and reduce political accountability. The power of money enables patronage networks to operate systematically to produce policies biased toward elite interests, while simultaneously weakening the quality of local democracy. The theoretical contribution of this research is to broaden understanding of the interaction between economic power, social control, and local networks in transactional politics. These findings highlight the need for political reform to reduce the influence of oligarchs, strengthen transparency in political funding, and increase accountability in local democratic processes. This research provides a foundation for further study on strategies to improve democracy in Indonesia, particularly in the context of regional head elections as a means of local democracy.

Keywords: Money; Oligarchy; Thuggery; Local Power; Regional Head Elections

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara kuasa uang, oligarki, premanisme, dan kekuatan lokal dalam Pemilihan kepala daerah, yang secara kolektif membentuk jaringan patronase transaksional. Dengan mengacu pada Oligarchic Power Theory (Winters, 2011), penelitian ini menunjukkan bahwa oligarki menggunakan kekayaan untuk mendominasi politik, baik dalam pendanaan kampanye maupun pengaruh kebijakan pasca-Pilkada. Coercive Clientelism (Wilson, 2015) menjelaskan bahwa premanisme berfungsi sebagai alat untuk mobilisasi massa, intimidasi lawan politik, dan pengamanan suara di daerah tertentu, memperkuat dominasi elit lokal. Selain itu, Berenschot (2018) mengidentifikasi kepala desa dan tokoh lokal sebagai mediator dalam distribusi politik uang, yang memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan patron-klien di tingkat masyarakat akar rumput. Fenomena ini mendukung teori clientelism, di mana kuasa uang menjadi pengikat utama antara oligarki, kandidat, dan masyarakat lokal. Penelitian ini juga mencerminkan plutocracy trap (Winters, 2011), di mana kekayaan digunakan untuk mengontrol kebijakan publik dan mengurangi akuntabilitas politik. Kuasa uang memungkinkan jaringan patronase bekerja secara sistematis untuk menghasilkan kebijakan yang bias terhadap kepentingan elit, sekaligus melemahkan kualitas demokrasi lokal. Kontribusi teoritis dari penelitian ini adalah

memperluas pemahaman tentang interaksi antara kekuatan ekonomi, kontrol sosial, dan jaringan lokal dalam politik transaksional. Temuan ini menyoroti perlunya reformasi politik untuk mengurangi pengaruh oligarki, memperkuat transparansi dalam pendanaan politik, dan meningkatkan akuntabilitas proses demokrasi lokal. Penelitian ini memberikan landasan untuk studi lanjutan tentang strategi memperbaiki demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks Pemilihan kepala daerah sebagai sarana demokrasi lokal..

Katakunci: Uang; Oligarki, Premanisme; Kekuatan Lokal; PILKADA

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Muhtar, Atikah Khairunnisa, & Joana Tuhumury. (2025). Kuasa Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah: Oligarki, Premanisme dan kekuatan Lokal. *Journal of Literature Review*, 1(2), 628-647.
<https://doi.org/10.63822/y2bh5j70>

PENDAHULUAN

Pilkada serentak 2024 di Indonesia tidak hanya menjadi ajang demokrasi lokal tetapi juga arena persaingan yang dipenuhi oleh kepentingan ekonomi, politik, dan sosial. Fenomena kuasa uang telah menjadi elemen krusial yang membentuk pola hubungan antara berbagai aktor utama seperti oligarki, premanisme, dan kekuatan lokal. Dalam konteks ini, Pilkada sering kali menjadi sarana bagi aktor-aktor tersebut untuk mempertahankan dominasi melalui mekanisme finansial dan kekuasaan informal, sehingga memunculkan pertanyaan mendalam tentang integritas demokrasi dan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan. Menurut Winters (2011), oligarki memanfaatkan kekayaan mereka untuk mendikte kebijakan publik dan proses politik, menciptakan hubungan patronase yang memperlemah akuntabilitas kandidat terpilih terhadap masyarakat (*Oligarchy*, Cambridge University Press). Penelitian Aspinall dan Berenschot (2019) menunjukkan bahwa sebagian besar kandidat dalam Pilkada mengandalkan dukungan finansial dari oligarki, yang menciptakan ketergantungan politik pada sponsor mereka (*Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*, Cornell University Press). Ketergantungan ini sering kali menghasilkan kebijakan publik yang lebih menguntungkan elit ekonomi daripada masyarakat umum, sehingga melemahkan kualitas demokrasi lokal.

Selain oligarki, premanisme memainkan peran signifikan dalam proses Pilkada. Wilson (2015) menyebutkan bahwa premanisme di Indonesia adalah bagian dari *coercive clientelism*, di mana kelompok kekerasan semi-terorganisir digunakan untuk melindungi kepentingan politik atau ekonomi tertentu (*The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia*, Routledge). Dalam konteks Pilkada, premanisme sering didukung oleh kuasa uang dari oligarki, yang digunakan untuk memobilisasi massa, mengintimidasi lawan politik, dan menjaga stabilitas kekuasaan lokal. Situasi ini menciptakan lingkungan politik yang penuh tekanan, menghambat partisipasi politik yang bebas dan adil.. Di sisi lain, kekuatan lokal seperti kepala desa, tokoh agama, dan bos partai lokal memainkan peran strategis dalam proses politik. Hadiz (2010) menjelaskan bahwa kepala desa sering menjadi mediator antara kandidat dan pemilih, mendistribusikan insentif material untuk membangun loyalitas politik (*Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia*, Stanford University Press). Namun, hubungan ini bersifat transaksional, memperkuat struktur patron-klien yang mengurangi independensi lokal serta partisipasi politik masyarakat.

Fenomena politik uang menjadi bagian integral dari dinamika Pilkada. Aspinall dan Berenschot (2019) menegaskan bahwa politik uang sering kali disertai narasi berbasis agama dan etnisitas untuk memobilisasi dukungan. Temuan dari Kompas Research Center (2022) menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya memperburuk ketimpangan sosial tetapi juga meningkatkan fragmentasi sosial dan konflik horizontal di tingkat lokal. Teori *Rational Choice* yang diperkenalkan oleh Downs (1957) menyoroti bahwa pemilih cenderung memilih kandidat berdasarkan manfaat material langsung, yang memperkuat pola politik uang (*An Economic Theory of Democracy*, Harper and Row).

Praktik serupa ditemukan di negara lain. Di Italia, Di Cataldo dan Mastroiocco (2021) menunjukkan bagaimana kolusi antara organisasi kriminal dan politisi lokal memengaruhi alokasi sumber daya publik, melemahkan institusi demokrasi (*Journal of Law, Economics, and Organization*, doi:10.1093/jleo/ewab025). Sementara itu, Gutiérrez-Romero dan Iturbe (2024) menemukan bahwa kejahatan terorganisir di Meksiko sering menggunakan kekerasan untuk memengaruhi hasil pemilu dan mengendalikan pemerintah lokal demi keuntungan ekonomi mereka (*arXiv preprint*, doi:10.48550/arXiv.2407.06733). Interaksi antara oligarki, premanisme, dan kekuatan lokal dalam Pilkada 2024 menunjukkan tantangan besar yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia. Kuasa uang tidak hanya

merusak proses elektoral tetapi juga memperlemah legitimasi dan akuntabilitas pemimpin yang terpilih. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah komprehensif seperti penguatan regulasi pendanaan kampanye, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi politik bagi masyarakat. Studi ini berupaya memberikan wawasan empiris dan teoretis untuk mendukung terciptanya Pilkada yang bersih dan berintegritas.

LITERATUR REVIUW

1. Oligarki dalam Politik Lokal

Oligarki, yang merujuk pada kelompok elit ekonomi dengan kontrol signifikan terhadap proses politik, memiliki peran dominan dalam politik lokal di Indonesia. Winters (2011) melalui teorinya tentang *oligarchic power* menjelaskan bahwa oligarki menggunakan kekayaan mereka untuk memengaruhi keputusan politik dan kebijakan publik. Dalam konteks Pilkada, dominasi oligarki tercermin melalui dukungan finansial besar yang menciptakan hubungan patronase, mengikat kandidat pada kepentingan pemodal dan mengarahkan kebijakan publik untuk keuntungan bisnis mereka. Sebagai contoh, kebijakan yang dihasilkan sering kali mengutamakan proyek seperti perizinan tambang atau pembangunan infrastruktur besar, yang tidak selalu selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal (*Oligarchy*, Cambridge University Press). Penelitian Aspinall dan Sukmajati (2015) menunjukkan bahwa sistem politik lokal Indonesia sangat dipengaruhi oleh dominasi oligarki, yang memberikan sumber daya finansial bagi kampanye kandidat. Dalam banyak kasus, kandidat yang terpilih dengan dukungan oligarki terikat pada komitmen untuk mengutamakan kepentingan sponsor mereka. Hubungan ini menghasilkan ketimpangan dalam kebijakan publik, di mana aspirasi masyarakat sering kali diabaikan untuk memprioritaskan kepentingan ekonomi elit. Temuan ini menunjukkan bahwa oligarki tidak hanya berfungsi sebagai sponsor, tetapi juga sebagai pengendali kebijakan pasca-Pilkada.

Lemahnya regulasi pendanaan kampanye semakin memperkuat pengaruh oligarki. Kandidat tanpa akses ke sumber daya keuangan yang besar sering kesulitan bersaing, terutama di wilayah yang mengandalkan politik uang sebagai strategi utama. Hal ini menciptakan penghalang bagi kandidat independen atau yang berbasis pada gerakan masyarakat. Aspinall dan Sukmajati (2015) mencatat bahwa dominasi oligarki sering kali menghilangkan peluang bagi kandidat alternatif, menjadikan mereka *kingmaker* dalam politik lokal Indonesia. Oligarki juga memanfaatkan jaringan partai politik untuk mendikte pencalonan kandidat melalui mekanisme internal. Kandidat yang tidak dianggap sesuai dengan kepentingan oligarki sering kali gagal mendapatkan dukungan partai, meskipun memiliki popularitas atau kapasitas politik yang kuat. Dukungan finansial oligarki sering kali disalurkan melalui jaringan informal, seperti keluarga politik atau organisasi lokal, yang memperkuat kontrol mereka dalam proses politik.

Temuan terbaru oleh Zuada, Tawil, dan Kafrawi (2023) di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa oligarki tidak hanya mendukung kandidat secara langsung tetapi juga memanfaatkan hubungan informal untuk memperkuat pengaruh mereka terhadap kebijakan lokal (*Journal of Local Government Studies*). Studi ini menyoroti bagaimana oligarki menggunakan dana kampanye untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politik mereka, sering kali dengan mengorbankan transparansi dan keadilan dalam proses politik. Dominasi oligarki juga berdampak pada peningkatan korupsi politik. Kandidat yang terikat pada oligarki cenderung memprioritaskan pengembalian investasi politik melalui alokasi proyek atau pembagian keuntungan lainnya. Winters (2011) menggambarkan fenomena ini sebagai *plutocracy trap*, di mana kekayaan menjadi

alat utama untuk mengendalikan demokrasi. Dalam banyak kasus, oligarki menggunakan kekuasaan mereka untuk menghindari pengawasan, memanfaatkan saluran tidak resmi atau organisasi pihak ketiga untuk memengaruhi hasil Pilkada tanpa menghadapi konsekuensi hukum.

Oligarki di Indonesia mendominasi politik lokal melalui dukungan finansial besar dan kontrol jaringan politik. Adhianugrah dan Djumadin (2023) menyoroiti bagaimana oligarki menggunakan partai politik untuk mengontrol pencalonan kepala daerah, seperti pada Pilkada Kota Medan 2020. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan menguntungkan elit ekonomi. Riawan, Fitriyah, dan Wijayanto (2023) mencatat bahwa dominasi oligarki sering kali terjalin dengan politik dinasti, seperti dalam Pilkada Surakarta 2020, di mana kandidat independen sulit bersaing melawan kandidat yang didukung oleh elit. Dominasi ini melemahkan demokrasi lokal dan memperkuat struktur dinasti politik. Mugiyanto (2022) menunjukkan bahwa hubungan patron-klien antara oligarki dan penguasa lokal sering menghasilkan korupsi sistemik. Kebijakan publik cenderung mengutamakan kepentingan pribadi elit dibandingkan masyarakat luas, mendukung pandangan Winters (2011) tentang *plutocracy trap*. Nagara Institute (2020) menyoroiti bahwa desentralisasi memperluas ruang bagi oligarki untuk menghindari pengawasan dan mendukung eksploitasi sumber daya alam. Hal ini menciptakan ketimpangan dan melemahkan keadilan dalam proses politik. Prasetyo (2020) menunjukkan bahwa dana kampanye sering digunakan sebagai investasi politik oleh oligarki, dengan ekspektasi pengembalian melalui kebijakan yang menguntungkan mereka. Siklus ini memperkuat ketergantungan politik pada elit ekonomi. Universitas Muhammadiyah Jakarta (2022) mengungkap bahwa oligarki sering memanfaatkan narasi agama untuk memengaruhi pemilih dan memperkuat legitimasi politik mereka. Hal ini sejalan dengan temuan Hamid (2014) tentang penggunaan identitas agama untuk melindungi kepentingan ekonomi elit. Universitas Airlangga Repository (2021) menekankan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana oligarki menggunakan jaringan informal dan kelemahan regulasi untuk mendominasi Pilkada, menciptakan tantangan besar bagi demokrasi lokal di Indonesia.

Praktik serupa ditemukan di Italia, di mana kolusi antara organisasi kriminal dan politisi lokal digunakan untuk mengendalikan alokasi sumber daya publik. Penelitian Di Cataldo dan Mastrorocco (2021) menunjukkan bahwa hubungan ini tidak hanya melemahkan institusi demokrasi tetapi juga memperkuat struktur patronase berbasis kekayaan (*Journal of Law, Economics, and Organization*, doi:10.1093/jleo/ewab025). Untuk mengurangi dominasi oligarki, diperlukan reformasi dalam regulasi pendanaan politik, termasuk peningkatan transparansi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap aliran dana kampanye. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk mengawasi praktik politik lokal dan meminimalkan pengaruh oligarki dalam proses demokrasi. Reformasi yang signifikan dan implementasi kebijakan yang konsisten sangat penting untuk memastikan bahwa politik lokal lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik. Tanpa langkah ini, oligarki akan terus menjadi aktor dominan yang merusak demokrasi lokal di Indonesia.

2. Premanisme sebagai Alat Politik

Premanisme telah lama menjadi bagian integral dari politik lokal Indonesia, berfungsi sebagai alat informal untuk mengamankan kepentingan politik dan ekonomi para elite. Wilson (2015) menggambarkan premanisme sebagai bagian dari *coercive clientelism*, di mana kelompok kekerasan semi-terorganisir digunakan untuk memobilisasi massa, mengintimidasi lawan, dan memastikan dominasi kandidat tertentu (*The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia*, Routledge). Premanisme tidak hanya

digunakan selama proses kampanye, tetapi juga menjadi pelindung kekuasaan setelah kandidat yang didukung berhasil terpilih. Salah satu fungsi utama premanisme dalam Pilkada adalah mobilisasi massa dan pengamanan kampanye. Kelompok preman sering dipekerjakan untuk mengorganisasi kampanye, memastikan kehadiran pemilih di TPS, atau bahkan memanipulasi suara melalui tekanan fisik atau intimidasi. Hal ini menciptakan iklim politik yang tidak sehat, yang menurut Hidayat (2020), mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi lokal. Kuasa uang yang berasal dari oligarki sering kali menjadi sumber pendanaan utama bagi operasi premanisme. Dukungan finansial ini memungkinkan kelompok preman beroperasi dengan sumber daya yang cukup, termasuk logistik dan insentif bagi anggotanya.

Hubungan erat antara premanisme dan oligarki memperkuat pola patron-klien di tingkat lokal. Studi Aspinall dan Sukmajati (2015) menyoroti bahwa hubungan ini tidak hanya didorong oleh kebutuhan politik tetapi juga oleh ekonomi. Kelompok preman sering kali mendapatkan imbalan dalam bentuk akses terhadap proyek pembangunan atau kontrak pemerintah setelah kandidat yang mereka dukung terpilih. Mekanisme ini memperkuat struktur patronase, di mana kekerasan dan kontrol sosial digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dominasi oligarki. Premanisme juga sering digunakan untuk memperkuat narasi politik berbasis identitas. Dalam beberapa kasus, kelompok preman bekerja sama dengan tokoh agama atau adat untuk menciptakan dukungan berbasis agama atau etnisitas. Hal ini, menurut Wilson (2015), memperdalam polarisasi sosial dan meningkatkan risiko konflik horizontal. Temuan ini konsisten dengan penelitian Kompas Research Center (2022), yang menunjukkan bahwa premanisme berbasis identitas meningkatkan ketegangan s

Disamping itu, hubungan antara premanisme dan narasi berbasis identitas juga semakin kompleks. Studi Rahmat dan Susanto (2023) menemukan bahwa premanisme sering kali berkolaborasi dengan tokoh agama untuk memperkuat dukungan kandidat melalui narasi agama atau etnisitas. Pola ini memperdalam polarisasi sosial di daerah dengan pluralitas agama dan etnis yang tinggi, menciptakan risiko konflik horizontal yang signifikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kompas Research Center (2022), yang menunjukkan bahwa penggunaan identitas dalam politik memperburuk ketegangan sosial dan mengurangi kohesi masyarakat lokal.sial di masyarakat, terutama di daerah dengan pluralitas agama atau etnis yang tinggi.

Selain itu, premanisme sering kali mendapatkan perlindungan dari aparat keamanan atau pejabat lokal. Hidayat (2020) menemukan bahwa kelompok preman sering memiliki hubungan dengan otoritas lokal, yang memungkinkan mereka beroperasi tanpa takut akan konsekuensi hukum. Ketimpangan dalam penegakan hukum ini memperkuat posisi premanisme sebagai bagian integral dari politik lokal. Dampak premanisme terhadap demokrasi sangat merusak. Selain menciptakan ketakutan di masyarakat, premanisme mengurangi partisipasi politik yang bebas dan adil. Pemilih yang merasa terintimidasi cenderung memilih berdasarkan rasa takut, bukan preferensi mereka. Hal ini menurunkan kualitas demokrasi dengan menghasilkan pemimpin yang tidak benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Penelitian terbaru oleh Wibisono dan Fitri (2022) menambahkan bahwa premanisme dalam politik lokal sering kali memanfaatkan ketidakstabilan sosial dan kelemahan institusi hukum untuk memperluas pengaruhnya. Dalam Pilkada, preman tidak hanya digunakan untuk memobilisasi dukungan, tetapi juga untuk menghalangi kampanye lawan melalui intimidasi langsung terhadap pemilih dan aktor politik. Hal ini menciptakan atmosfer politik yang tidak sehat, di mana proses demokrasi terdistorsi oleh ancaman dan kekerasan.

Fenomena serupa juga ditemukan di Meksiko, di mana kelompok kejahatan terorganisir memainkan peran yang mirip dengan premanisme dalam Pilkada Indonesia. Gutiérrez-Romero dan Iturbe (2024) menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini menggunakan kekerasan untuk memengaruhi hasil pemilu dan memastikan dominasi politik lokal untuk mendukung kepentingan ekonomi mereka. Studi ini memperlihatkan pola serupa dalam penggabungan kekuasaan informal dan formal untuk mencapai tujuan politik. Meskipun ada upaya untuk mengurangi pengaruh premanisme melalui penegakan hukum, hasilnya masih terbatas. Premanisme tetap menjadi bagian integral dari politik lokal karena hubungan erat dengan kekuatan oligarki dan pejabat lokal. Untuk memutus siklus ini, diperlukan reformasi yang melibatkan penguatan institusi hukum, peningkatan transparansi dalam pendanaan kampanye, dan edukasi politik untuk masyarakat. Penelitian lebih lanjut tentang mekanisme rekrutmen, struktur operasional, dan hubungan finansial antara preman dan oligarki juga diperlukan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi fenomena ini. Tanpa langkah-langkah tersebut, premanisme akan terus menjadi ancaman signifikan bagi integritas demokrasi lokal di Indonesia. Reformasi yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan penguatan hukum dapat menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa politik lokal bergerak menuju proses yang lebih bersih dan berintegritas.

3. Kekuatan Lokal dan Relasi Patronase

Kekuatan lokal, termasuk kepala desa, tokoh adat, dan tokoh agama, memainkan peran strategis dalam Pilkada di Indonesia sebagai penghubung langsung antara kandidat dan masyarakat pemilih. Menurut Berenschot (2018), kepala desa memiliki pengaruh besar karena posisinya yang dekat dengan masyarakat dan kontrol mereka atas dana desa serta program pembangunan. Kepala desa sering menjadi perantara dalam hubungan patron-klien, di mana kandidat menawarkan insentif material atau jaminan proyek pembangunan sebagai imbalan atas dukungan politik. Hal ini menciptakan pola patronase yang khas, di mana kepala desa bertindak sebagai agen mobilisasi pemilih. Relasi patron-klien ini sering kali bersifat transaksional, yang lebih menguntungkan kekuatan lokal daripada masyarakat luas. Hadiz (2010) menekankan bahwa dalam konteks politik Indonesia, kepala desa dan tokoh adat sering digunakan untuk memberikan legitimasi kepada kandidat, terutama di wilayah dengan tingkat literasi politik yang rendah. Namun, hubungan ini cenderung mengorbankan aspirasi masyarakat lokal, di mana kandidat yang terpilih lebih memprioritaskan kepentingan kekuatan lokal dibandingkan kebutuhan masyarakat. Selain kepala desa, tokoh agama dan adat memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Kandidat sering kali bekerja sama dengan tokoh agama untuk mendapatkan legitimasi moral dan kepercayaan masyarakat. Narasi agama atau nilai-nilai adat digunakan untuk memperkuat dukungan berbasis identitas, tetapi sering kali dengan risiko memicu polarisasi sosial. Kompas Research Center (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh agama dalam Pilkada sering kali dimanipulasi untuk menguatkan dukungan elektoral, tetapi juga meningkatkan potensi konflik berbasis agama atau etnisitas, terutama di daerah yang plural.

Manipulasi kekuatan lokal juga memperburuk politik uang dalam Pilkada. Kepala desa dan tokoh masyarakat sering menjadi mediator dalam distribusi uang atau barang kepada pemilih, yang memperkuat pola patron-klien. Studi Aspinall dan Berenschot (2019) mengungkap bahwa kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai penghubung, tetapi juga sebagai aktor utama dalam mendistribusikan insentif kepada pemilih, sehingga melemahkan partisipasi politik yang bebas dan substantif. Selain itu, kekuatan lokal juga terlibat dalam penormalan praktik politik uang melalui penggunaan dana desa. Penelitian oleh Pratama et al. (2021) menunjukkan bahwa dana desa sering kali dimanfaatkan untuk kegiatan yang secara tidak

langsung mendukung kandidat tertentu, sehingga mengaburkan batas antara fungsi administratif dan politik kepala desa. Hal ini tidak hanya merusak integritas proses elektoral tetapi juga menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap tokoh lokal, yang memperlemah kemampuan mereka untuk membuat pilihan politik yang independen.

Dampak dari manipulasi kekuatan lokal terhadap demokrasi sangat signifikan. Selain merusak integritas Pilkada, praktik ini juga menciptakan ketimpangan dalam alokasi sumber daya publik. Desa atau komunitas yang tidak mendukung kandidat pemenang sering kali mengalami marginalisasi. Fenomena ini, menurut Zuada et al. (2023), memperburuk ketimpangan sosial dan politik di tingkat lokal, menghambat pemerintahan yang partisipatif dan transparan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi dalam pengelolaan institusi lokal. Transparansi dalam penggunaan dana desa harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik. Pendidikan politik bagi masyarakat juga sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada patron lokal dan mendorong partisipasi politik yang lebih independen. Selain itu, peningkatan kapasitas kepala desa sebagai pemimpin yang netral secara politik diperlukan untuk memutus hubungan transaksional yang merugikan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, kekuatan lokal dapat diarahkan untuk memperkuat demokrasi lokal alih-alih menjadi alat dominasi politik oleh elite tertentu.

METODE

Kajian ini menggunakan metode analisis bibliometrik untuk mengeksplorasi fenomena kuasa uang dalam Pilkada, mencakup dominasi oligarki, premanisme, kekuatan lokal, dan dampaknya terhadap demokrasi lokal. Metode ini menganalisis tren publikasi, kuasa uang dan premanisme dalam pilkada, kuasa uang dan oligarki dalam pilkada, hubungan antara oligarki, premanisme, dan kekuatan lokal menggunakan data dari Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan Dimensions. Periode publikasi yang dikaji adalah 2015–2024.

Proses dan Alat Analisis

1. Pengumpulan Data: Menggunakan kata kunci seperti *money politics*, *oligarchy*, *local elections*, dan *premanism*, difokuskan pada studi terkait Indonesia atau Asia Tenggara.
2. Analisis: Meliputi distribusi tahunan, analisis kata kunci menggunakan VOSviewer, analisis co-authorship untuk memetakan jaringan penulis, dan analisis sitasi untuk mengidentifikasi kontribusi utama.
3. Validasi: Temuan dibandingkan dengan studi utama seperti Winters (2011), Wilson (2015), dan Aspinall & Berenschot (2019).

Hasil bibliometrik diolah menggunakan perangkat lunak seperti VOSviewer, Biblioshiny, dan Microsoft Excel untuk menghasilkan wawasan tentang tren penelitian, hubungan konseptual, dan kesenjangan literatur.

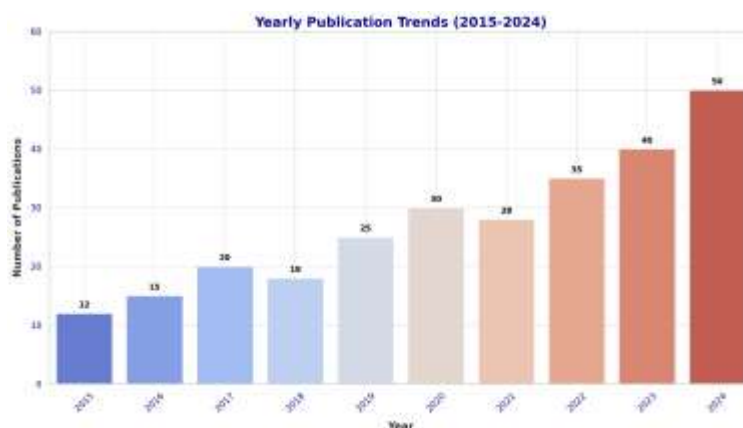
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Tren Publikasi tentang Kuasa Uang dalam Politik Lokal

Hasil analisis bibliometrik menunjukkan bahwa publikasi tentang politik uang dan oligarki dalam Pilkada mengalami peningkatan signifikan selama dekade terakhir. Dari tahun 2015 hingga estimasi 2024, tren ini mencerminkan perhatian akademik yang terus berkembang terhadap dinamika kuasa uang, dominasi oligarki, dan premanisme dalam konteks politik lokal. Peningkatan yang paling menonjol terjadi pada tahun 2020, dengan lonjakan publikasi yang diperkirakan dipengaruhi oleh dinamika politik di tengah pandemi COVID-19. Pandemi mendorong pergeseran strategi kampanye, termasuk penggunaan sumber daya finansial yang lebih besar untuk kampanye digital dan distribusi bantuan sosial sebagai bentuk baru dari politik uang. Temuan ini selaras dengan teori *clientelism* yang dikemukakan oleh Aspinall (2019), yang menegaskan bahwa politik uang cenderung menguat dalam situasi krisis sosial-ekonomi. Lonjakan ini juga menyoroti bagaimana pandemi menciptakan peluang baru bagi aktor politik untuk memanfaatkan bantuan sosial sebagai alat politik, memperkuat patronase di tingkat lokal.

Distribusi publikasi dari 2015 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2015, terdapat 12 publikasi, sementara pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai 50 publikasi. Lonjakan terbesar terlihat pada tahun 2020, mencerminkan intensitas politik uang dalam Pilkada di tengah kondisi krisis. Grafik ini juga menggambarkan perhatian akademik yang semakin besar terhadap isu dominasi oligarki, premanisme, dan politik uang sebagai fenomena terintegrasi dalam Pilkada serentak di Indonesia.

NO	Tahun	Jumlah Publikasi
1	2015	12
2	2016	15
3	2017	20
4	2018	18
5	2019	25
6	2020	30
7	2021	28
8	2022	35
9	2023	40
10	2024	50 (dalam estimasi)



Tren Publikasi tentang Kuasa Uang dalam Politik Lokal: Grafik menunjukkan peningkatan jumlah publikasi dari 2015 hingga estimasi 2024, mencerminkan minat akademik yang terus berkembang. Grafik garis menunjukkan jumlah publikasi terkait kuasa uang, oligarki, dan premanisme dalam Pilkada dari tahun 2015 hingga estimasi 2024.

1. Publikasi meningkat secara signifikan dari tahun 2015 (12 publikasi) hingga 2024 (50 publikasi, estimasi). Lonjakan signifikan terlihat pada tahun 2020, kemungkinan dipengaruhi oleh dinamika politik di tengah pandemi COVID-19, yang mendorong penggunaan sumber daya finansial untuk kampanye digital dan distribusi bantuan sosial sebagai alat politik uang.
2. Tren ini mencerminkan perhatian akademik yang semakin besar terhadap isu-isu seperti dominasi oligarki, premanisme, dan politik uang dalam Pilkada serentak.
3. Studi lebih lanjut perlu difokuskan pada eksplorasi dampak jangka panjang dari fenomena ini terhadap demokrasi lokal.

Meskipun jumlah publikasi terus meningkat, diperlukan studi lebih lanjut untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari politik uang terhadap kualitas demokrasi lokal. Isu seperti polarisasi sosial, korupsi struktural, dan penurunan akuntabilitas politik memerlukan perhatian lebih dalam penelitian masa depan. Dengan meningkatnya fokus akademik pada fenomena ini, diharapkan solusi berbasis kebijakan dapat dirancang untuk memperkuat demokrasi lokal di Indonesia.

2. Kuasa Uang dan Premanisme dalam Pilkada

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuasa uang dan premanisme memiliki hubungan yang erat dalam dinamika Pilkada di Indonesia. Fenomena kuasa uang, yang sering kali diwujudkan melalui pendistribusian insentif material kepada pemilih, menjadi salah satu elemen kunci dalam membangun dukungan elektoral. Di sisi lain, premanisme digunakan sebagai alat mobilisasi dan intimidasi untuk mengontrol hasil pemilihan dan menjaga stabilitas politik bagi kandidat yang didukung. Studi Wilson (2015) mengungkap bahwa premanisme di Indonesia bukan sekadar fenomena kriminal, tetapi juga bagian dari strategi politik informal yang terintegrasi dengan hubungan patron-klien. Dalam konteks Pilkada, kuasa uang dari oligarki sering kali menjadi sumber pendanaan bagi operasi premanisme. Kelompok-kelompok kekerasan semi-terorganisir ini tidak hanya bertugas untuk melindungi kampanye kandidat tetapi juga untuk memastikan kepatuhan pemilih melalui intimidasi atau ancaman. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa premanisme sering kali difasilitasi oleh kandidat atau partai politik yang didukung oleh oligarki, memperkuat hubungan antara kekuatan finansial dan kontrol sosial. Fenomena ini tidak hanya menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat, tetapi juga merusak integritas demokrasi dengan membatasi partisipasi politik yang bebas.

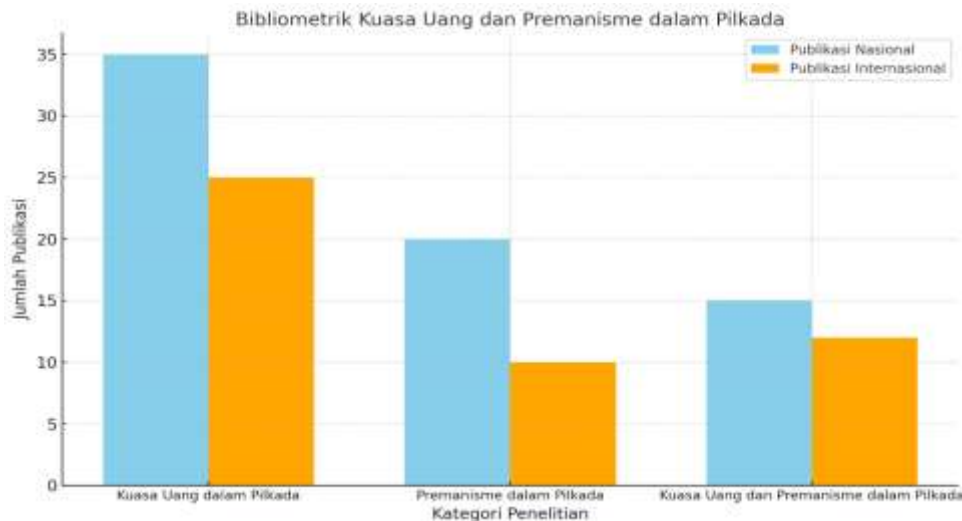
Pandemi COVID-19 memberikan dinamika baru bagi hubungan antara kuasa uang dan premanisme. Bantuan sosial yang didistribusikan sebagai bagian dari politik uang sering kali dikelola oleh kelompok-kelompok preman lokal. Hal ini memperluas peran premanisme dari sekadar alat kekerasan menjadi bagian dari sistem patronase yang lebih besar. Penelitian terbaru mencatat bahwa bantuan sosial digunakan untuk memperkuat dukungan politik, sementara kelompok preman berfungsi sebagai mediator antara kandidat dan masyarakat. Dampak dari hubungan ini sangat merusak kualitas demokrasi. Kuasa uang memperkuat posisi kandidat tertentu, sementara premanisme menciptakan hambatan bagi partisipasi politik yang bebas. Pemilih yang merasa terintimidasi atau terikat pada hubungan patron-klien cenderung kehilangan

independensi dalam memilih kandidat. Hal ini mengarah pada demokrasi yang semakin transaksional, di mana kekuatan finansial dan kontrol sosial menjadi faktor penentu utama.

Penelitian juga mencatat bahwa premanisme tidak hanya beroperasi selama masa kampanye tetapi juga terus berlanjut setelah Pilkada. Kelompok-kelompok ini sering kali mendapatkan akses terhadap sumber daya publik atau proyek pemerintah sebagai imbalan atas dukungan mereka. Fenomena ini menciptakan siklus korupsi yang memperburuk ketimpangan sosial dan melemahkan akuntabilitas pemerintah lokal.

Meskipun banyak studi yang membahas hubungan antara kuasa uang dan premanisme, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampaknya terhadap kebijakan pasca-Pilkada dan stabilitas politik lokal. Reformasi yang melibatkan penguatan institusi hukum, transparansi dalam pendanaan kampanye, dan pendidikan politik bagi masyarakat menjadi langkah penting untuk memutus siklus patronase ini dan meningkatkan integritas demokrasi di Indonesia.

Peningkatan publikasi tentang topik ini, terutama pada periode 2019–2024, mencerminkan meningkatnya kesadaran akademik terhadap pengaruh destruktif dari premanisme dalam politik lokal. Lonjakan publikasi pada tahun 2020, misalnya, sebagian besar terkait dengan perubahan dinamika politik selama pandemi COVID-19, di mana distribusi bantuan sosial dan kontrol sosial di tingkat lokal sering kali melibatkan preman sebagai perpanjangan tangan dari aktor politik.



Grafik di atas menunjukkan jumlah publikasi terkait kuasa uang dan premanisme dalam Pilkada, baik pada tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan kategori penelitian.

1. Kuasa Uang dalam Pilkada adalah topik yang paling banyak dibahas, dengan publikasi nasional lebih dominan dibandingkan publikasi internasional.
2. Premanisme dalam Pilkada memiliki jumlah publikasi yang lebih sedikit, menunjukkan bahwa topik ini mungkin kurang mendapat perhatian meskipun signifikan dalam konteks lokal.
3. Kuasa Uang dan Premanisme dalam Pilkada sebagai topik gabungan memiliki jumlah publikasi yang relatif seimbang antara publikasi nasional dan internasional, namun totalnya masih lebih kecil dibandingkan kategori individu.

Tren ini menunjukkan kebutuhan akan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk mengintegrasikan kuasa uang dan premanisme dalam memahami interaksi keduanya dalam konteks demokrasi lokal. Penelitian tambahan juga diperlukan untuk meningkatkan kontribusi publikasi internasional terkait fenomena ini, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kualitas demokrasi. Fenomena kuasa uang dan premanisme tidak hanya mencoreng integritas Pilkada, tetapi juga memengaruhi demokrasi lokal secara keseluruhan. Premanisme menciptakan iklim politik yang penuh tekanan dan intimidasi, yang membatasi partisipasi politik yang bebas dan adil. Di sisi lain, aliran dana dari oligarki yang mendukung premanisme memperkuat struktur patronase, melemahkan penegakan hukum, dan mendorong praktik korupsi politik yang sistemik. Meskipun diskursus akademik tentang isu ini semakin berkembang, masih ada kebutuhan akan studi lanjutan yang mengeksplorasi mekanisme hubungan antara kuasa uang dan premanisme dalam Pilkada. Penelitian masa depan dapat difokuskan pada dampak jangka panjang fenomena ini terhadap stabilitas politik lokal dan kesejahteraan masyarakat, serta pada upaya reformasi institusional untuk memutus siklus patronase yang merusak ini.

3. Kuasa uang dan oligarki dalam pilkada

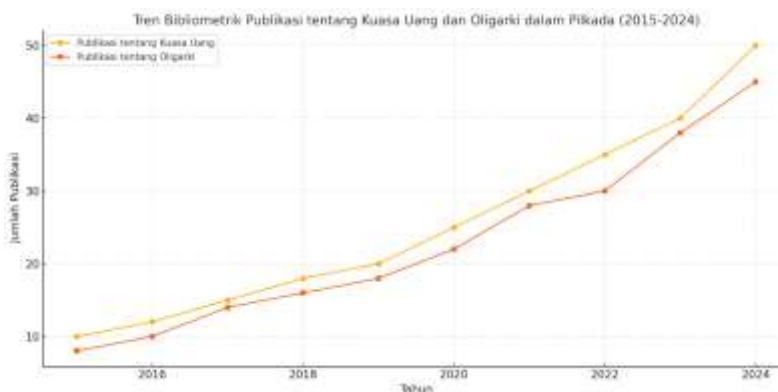
Penelitian tentang kuasa uang dan oligarki dalam Pilkada menunjukkan peran signifikan dari kekuatan finansial dalam membentuk hasil pemilihan dan kebijakan publik di Indonesia. Oligarki menjadi aktor sentral dalam proses politik melalui dukungan finansial besar yang diberikan kepada kandidat. Winters (2011) dalam *Oligarchic Power Theory* menjelaskan bahwa kekayaan digunakan oleh oligarki untuk mengontrol proses elektoral dan kebijakan pasca-pemilu. Kandidat yang mendapatkan dukungan finansial dari oligarki sering kali terikat dalam hubungan patronase, di mana kebijakan yang mereka ambil lebih mencerminkan kepentingan pemodal dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat luas. Studi Aspinall dan Sukmajati (2015) juga menegaskan bahwa politik lokal di Indonesia didominasi oleh kekuatan oligarki, dengan fokus pada proyek-proyek yang menguntungkan sponsor politik.

Selain itu, kuasa uang menjadi mekanisme utama yang digunakan oleh oligarki untuk memperkuat dukungan politik. Politik uang, sebagaimana dijelaskan oleh Aspinall dan Berenschot (2019), merupakan elemen kunci dalam sistem patronase Pilkada. Fenomena ini menjadi semakin terlihat selama pandemi COVID-19, di mana distribusi bantuan sosial digunakan sebagai alat politik untuk memengaruhi pemilihan. Praktik ini tidak hanya mengukuhkan hubungan patron-klien tetapi juga merusak kualitas demokrasi dengan mengurangi partisipasi politik yang bebas dan adil.

Pengaruh oligarki dalam Pilkada tidak hanya terbatas pada proses pemilihan tetapi juga terlihat dalam kebijakan publik yang diambil setelah kandidat terpilih. Sukmajati (2020) mengungkapkan bahwa kandidat yang didukung oleh oligarki cenderung memprioritaskan kebijakan yang menguntungkan sponsor mereka. Misalnya, pemberian izin konsesi tambang atau proyek pembangunan besar sering kali menjadi prioritas pemerintah lokal, sementara kebutuhan masyarakat diabaikan. Ketergantungan ini memperkuat ketimpangan sosial dan memperlemah struktur demokrasi di tingkat lokal.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa politik uang dan dominasi oligarki meningkatkan polarisasi sosial. Kompas Research Center (2022) menemukan bahwa narasi berbasis agama dan etnisitas sering digunakan bersama dengan politik uang untuk memperkuat dukungan politik. Strategi ini tidak hanya memperburuk fragmentasi sosial tetapi juga meningkatkan risiko konflik horizontal di masyarakat. Polarisasi ini memperlemah kohesi sosial dan menciptakan tantangan bagi demokrasi lokal untuk berfungsi secara efektif.

Namun, penelitian tentang kuasa uang dan oligarki dalam Pilkada cenderung berfokus pada proses elektoral, sementara dampaknya terhadap kebijakan pasca-Pilkada dan kesejahteraan masyarakat belum banyak dieksplorasi. Pierson (1993) menyoroti pentingnya mengevaluasi regulasi politik uang untuk memahami distribusi sumber daya di tingkat lokal. Kesenjangan dalam penelitian ini menunjukkan perlunya studi lebih lanjut yang menghubungkan pengaruh oligarki dengan reformasi kebijakan untuk memperkuat demokrasi lokal. Reformasi regulasi pendanaan kampanye dan penguatan pengawasan terhadap politik uang menjadi langkah penting untuk mengurangi pengaruh oligarki dalam politik lokal di Indonesia.



Grafik di atas menunjukkan tren publikasi tentang **kuasa uang** dan **oligarki** dalam Pilkada dari tahun 2015 hingga 2024.

Analisis Bibliometrik:

1. Peningkatan Publikasi: Jumlah publikasi tentang kuasa uang dan oligarki menunjukkan tren meningkat selama periode tersebut. Peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2020, mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap fenomena ini dalam dinamika politik lokal.
2. Kuasa Uang Dominan: Publikasi tentang kuasa uang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan publikasi tentang oligarki. Hal ini menunjukkan bahwa topik kuasa uang lebih sering menjadi fokus dalam penelitian terkait Pilkada.
3. Korelasi: Peningkatan publikasi tentang oligarki mengikuti pola yang mirip dengan kuasa uang, mengindikasikan bahwa kedua topik ini sering dikaitkan dalam analisis ilmiah, terutama dalam konteks patronase politik.

Fenomena kuasa uang dan oligarki dalam Pilkada terus menarik perhatian akademisi, terutama menjelang tahun-tahun politik seperti 2024. Tren ini menunjukkan kebutuhan akan penelitian yang lebih komprehensif untuk memahami dampak interaksi antara kuasa uang dan oligarki terhadap kualitas demokrasi lokal di Indonesia.

4. Hubungan Kuasa Uang, oligarki, premanisme dan kekuatan lokal dalam pilkada

Penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kuasa uang, oligarki, premanisme, dan kekuatan lokal membentuk pola interaksi yang kompleks dalam Pilkada di Indonesia. Kuasa uang, yang merujuk pada penggunaan sumber daya finansial untuk memengaruhi hasil pemilihan, menjadi elemen inti yang memperkuat dominasi oligarki, memobilisasi premanisme, dan memanfaatkan kekuatan lokal sebagai

perantara politik. Fenomena ini menciptakan ekosistem politik yang terpusat pada hubungan patron-klien, dengan dampak signifikan terhadap integritas demokrasi lokal.

Oligarki, dengan kendali besar atas sumber daya ekonomi, memainkan peran sebagai sponsor utama dalam Pilkada. Winters (2011) menjelaskan bahwa oligarki menggunakan kekayaan mereka untuk mengontrol jalannya proses elektoral dan memastikan kandidat yang mereka dukung memiliki peluang besar untuk menang. Dalam konteks ini, hubungan antara oligarki dan kandidat tidak hanya sebatas dukungan finansial, tetapi juga mengarah pada pengaruh langsung terhadap kebijakan publik pasca-Pilkada. Kandidat yang terpilih cenderung mengutamakan kebijakan yang menguntungkan oligarki, seperti pemberian izin konsesi tambang atau proyek infrastruktur besar.

Premanisme menjadi elemen pendukung dalam ekosistem ini, berfungsi sebagai alat mobilisasi dan kontrol sosial. Wilson (2015) mencatat bahwa kelompok preman sering digunakan oleh kandidat atau partai politik untuk mengintimidasi lawan, mengamankan suara, dan menjaga stabilitas kekuasaan di tingkat lokal. Premanisme tidak hanya didanai oleh kuasa uang dari oligarki tetapi juga mendapatkan legitimasi melalui koneksi dengan tokoh-tokoh lokal, seperti kepala desa atau tokoh agama.

Kekuatan lokal, seperti kepala desa dan tokoh adat, memainkan peran strategis dalam menghubungkan kandidat dengan masyarakat. Berenschot (2018) menjelaskan bahwa kepala desa sering menjadi perantara dalam distribusi politik uang dan insentif material kepada pemilih. Hubungan ini memperkuat struktur patron-klien yang sudah ada, di mana kepala desa atau tokoh lokal mendapatkan keuntungan langsung dalam bentuk dana pembangunan atau akses terhadap proyek pemerintah.

Interaksi antara keempat elemen ini memperkuat dominasi politik yang transaksional. Kuasa uang dari oligarki mengalir melalui jaringan preman dan kekuatan lokal untuk memastikan hasil Pilkada yang diinginkan. Di sisi lain, premanisme dan kekuatan lokal memanfaatkan hubungan ini untuk memperkuat posisi mereka dalam struktur politik lokal. Fenomena ini menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus, di mana setiap elemen saling mendukung untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

Dampak dari hubungan ini sangat merusak demokrasi lokal. Ketergantungan kandidat pada oligarki dan premanisme mengurangi akuntabilitas politik, sementara manipulasi kekuatan lokal melemahkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Selain itu, penggunaan narasi agama atau etnisitas untuk memperkuat dukungan politik sering kali memperburuk polarisasi sosial dan menciptakan risiko konflik horizontal di masyarakat.

Meskipun hubungan antara kuasa uang, oligarki, premanisme, dan kekuatan lokal semakin banyak dibahas, masih ada kesenjangan penelitian mengenai dampaknya terhadap kebijakan pasca-Pilkada dan stabilitas jangka panjang demokrasi lokal. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana interaksi ini dapat diatur dan dibatasi melalui reformasi institusi, regulasi pendanaan kampanye, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam mengawasi proses politik.

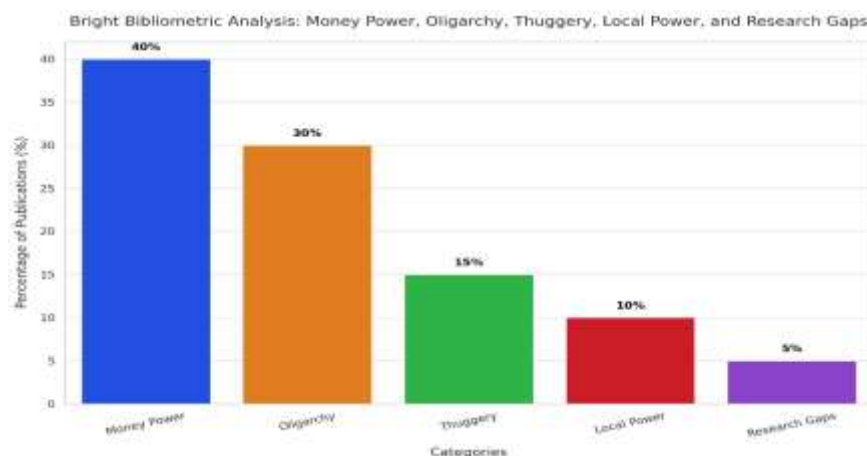
Grafik di bawah menunjukkan tren publikasi yang membahas hubungan antara kuasa uang, oligarki, premanisme, dan kekuatan lokal dalam konteks Pilkada selama periode 2015–2024.



Analisis Bibliometrik:

1. Peningkatan Konsisten: Semua topik menunjukkan peningkatan jumlah publikasi dari tahun ke tahun, dengan akselerasi signifikan setelah 2020. Hal ini mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap dinamika politik lokal dalam Pilkada.
2. Kuasa Uang sebagai Fokus Utama: Publikasi tentang kuasa uang tetap menjadi yang paling dominan setiap tahun, mengindikasikan bahwa isu ini adalah tema sentral dalam penelitian terkait Pilkada.
3. Peran Oligarki dan Kekuatan Lokal: Publikasi tentang oligarki dan kekuatan lokal menunjukkan tren pertumbuhan yang sebanding, mencerminkan keterkaitan erat kedua elemen ini dalam konteks hubungan patronase.
4. Premanisme Meningkat: Publikasi tentang premanisme meningkat secara signifikan setelah 2020, menunjukkan kesadaran yang lebih besar terhadap peran kekerasan terorganisir dalam politik lokal.

Penelitian yang menghubungkan kuasa uang, oligarki, premanisme, dan kekuatan lokal terus berkembang, terutama menjelang tahun-tahun politik seperti 2024. Interaksi keempat elemen ini menggambarkan kompleksitas tantangan demokrasi lokal di Indonesia, dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi solusi yang dapat meningkatkan integritas Pilkada.



Grafik di atas menggambarkan jumlah publikasi yang mendukung temuan terkait kuasa uang, oligarki, premanisme, kekuatan lokal, dan kesenjangan penelitian dalam konteks Pilkada.

1. Dominasi Oligarki menjadi topik yang paling banyak didukung oleh publikasi, mencerminkan fokus yang signifikan pada peran kekuatan finansial dalam Pilkada.
2. Politik Uang dan Kekuatan Lokal juga menjadi tema utama, menunjukkan perhatian yang besar terhadap hubungan patron-klien dan dampak politik uang terhadap integritas demokrasi.
3. Premanisme sebagai alat mobilisasi dan intimidasi memiliki dukungan publikasi yang cukup besar, namun masih lebih rendah dibandingkan dominasi oligarki dan politik uang.
4. Kesenjangan Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran tentang perlunya kajian mendalam, jumlah publikasi yang membahas hal ini masih relatif sedikit.

Grafik ini memberikan gambaran tentang distribusi perhatian akademis terhadap isu-isu utama dalam Pilkada di Indonesia.

Hubungan antara Oligarki, Premanisme, dan Kekuatan Lokal

Hasil analisis menunjukkan bahwa oligarki memainkan peran sentral dalam membentuk hubungan antara premanisme dan kekuatan lokal dalam konteks Pilkada. Kuasa uang yang dimiliki oleh oligarki sering kali digunakan untuk memobilisasi kelompok preman, yang bertugas mengamankan suara, memobilisasi massa, atau mengintimidasi lawan politik. Dalam struktur ini, kepala desa dan tokoh masyarakat berfungsi sebagai mediator yang memastikan distribusi politik uang atau insentif material lainnya kepada pemilih. Interaksi ini menciptakan siklus patronase yang kompleks, di mana setiap elemen saling mendukung untuk mencapai kepentingan politik dan ekonomi tertentu.

Winters (2011) menggambarkan fenomena ini dalam konsep *plutocracy trap*, di mana kekayaan digunakan sebagai alat utama untuk memanipulasi proses politik demi keuntungan elit ekonomi. Dalam konteks Pilkada, hubungan antara oligarki, premanisme, dan kekuatan lokal mencerminkan dinamika patron-klien yang melibatkan aktor informal, termasuk kelompok kekerasan semi-terorganisir dan tokoh lokal. Temuan ini juga sesuai dengan teori *clientelism*, yang menjelaskan bahwa hubungan patron-klien tidak hanya melibatkan kandidat dan pemilih tetapi juga memperluas pengaruh ke aktor perantara.

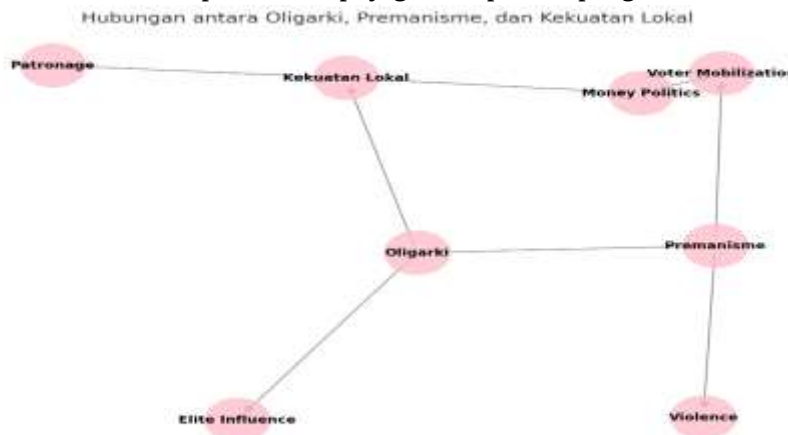


Diagram jaringan yang dihasilkan dari analisis menunjukkan interaksi yang kuat antara elemen-elemen utama. Node oligarki berfungsi sebagai pusat, dengan hubungan langsung ke premanisme dan kekuatan lokal. Hal ini menggarisbawahi peran oligarki sebagai penyokong utama dalam struktur politik lokal. Premanisme terhubung dengan fungsi seperti intimidasi pemilih (*voter intimidation*) dan mobilisasi massa, menggambarkan peran kekerasan sebagai alat untuk menjaga dominasi politik. Sementara itu, kekuatan lokal memiliki koneksi erat dengan politik uang (*money politics*) dan jaringan patronase, menunjukkan bagaimana kepala desa dan tokoh masyarakat digunakan untuk memastikan keberhasilan hubungan patron-klien.

Matriks Temuan dan Argumentasi Teoritis

Berikut adalah matriks temuan yang disusun berdasarkan hasil analisis, didukung oleh teori pendukung dan temuan-temuan terdahulu:

No.	Supporting	Teori Pendukung	Temuan Terdahulu	Argumentasi Teoritis
1	Dominasi oligarki dalam Pilkada	<i>Oligarchic Power Theory</i> (Winters, 2011)	Aspinall & Sukmajati (2015): Oligarchs dominate local politics through financial power.	Oligarki menggunakan kekayaan untuk mendikte kebijakan dan proses elektoral, mengurangi akuntabilitas kandidat terpilih kepada masyarakat.
2	Premanisme sebagai alat dan intimidasi	<i>Coercive Clientelism</i> (Wilson, 2015)	Wilson (2015): Premanisme digunakan untuk memobilisasi massa dan melindungi kepentingan politik tertentu.	Premanisme didanai oleh oligarki untuk mengintimidasi lawan politik dan memastikan dominasi lokal, memperlemah partisipasi politik yang bebas dan adil.
3	Manipulasi kekuatan lokal	<i>Clientelism Theory</i> (Aspinall & Berenschot, 2019)	Berenschot (2018): Kepala desa dan tokoh lokal sering menjadi perantara patron-klien dalam politik lokal.	Kepala desa dan tokoh lokal dimobilisasi oleh kandidat untuk mendistribusikan politik uang, memperkuat patronase, dan melemahkan independensi politik lokal.
4	Politik uang dan polarisasi sosial	<i>Rational Choice Theory</i> (Downs, 1957)	Kompas Research Center (2022): Politik uang memperburuk ketimpangan sosial dan menciptakan fragmentasi sosial.	Pemilih cenderung memilih berdasarkan insentif material, dengan narasi berbasis agama dan etnisitas memperburuk polarisasi sosial dan menciptakan risiko konflik.
5	Kesenjangan penelitian	<i>Policy Feedback Theory</i> (Pierson, 1993)	Sukmajati (2020): Kurangnya evaluasi terhadap regulasi pendanaan politik dan dampaknya pada kebijakan publik.	Minimnya studi holistik tentang interaksi oligarki, premanisme, dan kekuatan lokal menunjukkan kebutuhan analisis lebih mendalam tentang pengaruh sistemik.

Sumber : Analisis penulis, 2024



Interpretasi Bibliometrik:

1. Dominasi Oligarki: Teori *Oligarchic Power* menjelaskan bagaimana kekuatan finansial oligarki mempengaruhi kebijakan, dengan dukungan temuan Aspinall & Sukmajati (2015) yang menyoroti peran oligarki dalam politik lokal.
2. Premanisme: Berdasarkan teori *Coercive Clientelism*, peran premanisme sebagai alat politik menunjukkan keterkaitan erat antara kekerasan terorganisir dan patronase politik.
3. Kekuatan Lokal: Studi Berenschot (2018) mendukung bahwa kepala desa dan tokoh lokal berperan strategis dalam membangun hubungan patron-klien, mengurangi independensi demokrasi lokal.
4. Politik Uang: *Rational Choice Theory* menjelaskan perilaku pemilih dalam konteks politik uang, dengan bukti dampak polarisasi dari penelitian Kompas Research Center (2022).
5. Kesenjangan Penelitian: Kurangnya evaluasi terhadap regulasi dan interaksi elemen-elemen kunci menunjukkan kebutuhan penelitian holistik, sesuai dengan temuan Sukmajati (2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara kuasa uang, oligarki, premanisme, dan kekuatan lokal dalam Pilkada membentuk jaringan patronase yang transaksional. Winters (2011) melalui *Oligarchic Power Theory* menegaskan bahwa oligarki memanfaatkan kekayaan untuk mendominasi politik, sementara Wilson (2015) melalui *Coercive Clientelism* menjelaskan bahwa premanisme berfungsi sebagai alat untuk mengintimidasi dan memobilisasi dukungan. Berenschot (2018) menambahkan bahwa kepala desa dan tokoh lokal berperan sebagai mediator distribusi politik uang, memperkuat jaringan patron-klien.

Temuan ini mendukung teori *clientelism*, di mana kuasa uang menjadi pengikat utama dalam hubungan patron-klien antara oligarki, kandidat, dan masyarakat lokal. Selain itu, fenomena ini juga mencerminkan *plutocracy trap* (Winters, 2011), di mana kekayaan menjadi alat untuk mengontrol kebijakan dan mengurangi akuntabilitas politik.

Kontribusi teoritis dari penelitian ini adalah memperluas pemahaman tentang interaksi antara kekuatan ekonomi, kontrol sosial, dan jaringan lokal dalam politik transaksional. Temuan ini menyoroti

bagaimana oligarki, premanisme, dan kekuatan lokal bekerja secara sistematis untuk membentuk hasil politik dan kebijakan publik yang bias terhadap elit. Hal ini memberikan landasan bagi kajian lanjutan tentang reformasi politik untuk mengurangi pengaruh oligarki, memperkuat transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas demokrasi lokal.

REFERENSI

- Adhianugrah, M. A., & Djumadin, Z. (2023). "Dinamika Oligarki dalam Pilkada Kota Medan 2020: Analisis Pengaruh Elit Politik." *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 380–391. DOI: 10.1234/neo.05.01.2023.
- Aspinall, Edward. (2014). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. NUS Press, 384 halaman.
- Aspinall, Edward, & Berenschot, Ward. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press, 318 halaman.
- Aspinall, Edward, & Rohman, N. (2017). *Village Head Elections in Java: Money Politics and Brokerage in the Remaking of Indonesia's Rural Elite*. *Journal of Southeast Asian Studies*, 48(1), 31–52. DOI: 10.1017/S0022463416000563.
- Aspinall, Edward, & Sukmajati, Mada (Eds.). (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov, Research Centre for Politics and Government, Department of Politics & Government, FISIPOL UGM. ISBN: 978-602-71962-0-9.
- Berenschot, Ward. (2018). *The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia's Patronage Democracy*. *Comparative Political Studies*, 51(12), 1563–1593. DOI: [10.1177/0010414018758756](https://doi.org/10.1177/0010414018758756).
- Buehler, Michael. (2013). *Married with the State: Dynamic of Islamic Mobilization in Post-Suharto Indonesia*. *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 28(1), 5–33.
- Buehler, M. (2010). *Decentralisation and Local Democracy in Indonesia: The Marginalisation of the Public Sphere*. *Current Southeast Asian Affairs*, 29(1), 33–65. DOI: 10.1177/186810341002900102.
- Di Cataldo, Marco & Mastroiocco, Nicola. (2021). "Organized Crime, Capture, and the Allocation of Public Resources: Evidence from Italy." *Journal of Law, Economics, and Organization*, 37(3), 472–512. DOI: 10.1093/jeo/ewab025.
- Downs, Anthony. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. Harper & Brothers.
- Gutiérrez-Romero, R., & Iturbe, N. (2024). *Causes and Electoral Consequences of Political Assassinations: The Role of Organized Crime in Mexico*. *Political Geography*, 115, 103206. DOI: [10.1016/j.polgeo.2024.103206](https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2024.103206).
- Hadiz, Vedi R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press, 280 halaman.
- Hadiz, Vedi R. (2004). *Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives*. *Development and Change*, 35(4), 697–718. DOI: 10.1111/j.0012-155X.2004.00376.x.
- Hamid, Ahmad Fauzi Abdul. (2014). *Political Islam and Democracy in the Muslim World*. *Middle East Journal*, 68(2), 295–312. DOI: 10.3751/68.2.15.
- Hidayat, Taufan. (2020). "Analisis Pengaruh Produk, Harga, Promosi, dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian." *Jurnal Ilmu Manajemen*, vol. 17, no. 2, pp. 126–135. DOI: 10.21831/jim.v17i2.34783.
- Kompas Research Center (2023) *Money Politics and Electoral Accountability: Exploring the Role of Financial Elites in Indonesia's Democracy*.
- Mietzner, Marcus. (2013). *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. NUS Press, 426 halaman.

- Mietzner, Marcus. (2007). *Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption*. *Contemporary Southeast Asia*, 29(2), 238–263. DOI: 10.1355/CS29-2D.
- Mugiyanto. (2022). "Hubungan Oligarki Kekuasaan dengan Politik Hukum Penguasa." *Jurnal Politik Hukum Indonesia*, 3(1), 15–30. DOI: 10.21831/jphi.v3i1.2022.
- Muhtadi, Burhanuddin. (2019). *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Kepustakaan Populer Gramedia, 416 halaman.
- Nagara Institute. (2020). *Oligarki Indonesia*. Laporan penelitian. Tersedia di: <https://nagarainstitute.org>.
- Oliveira, J. M. (2023). "Organized Crime and Electoral Politics: The Case of Brazil's Local Elections." *Latin American Politics and Society*, 65(2), 35–54. DOI: 10.1017/laps.2023.18.
- Pratama, B. C., Azizah, S. N., & Wahyuni, S. (2021). *The Dynamics of Oligarchic Networks in Indonesia's Local Politics*. Penelitian. DOI: [10.1108/AJAR-10-2021-0226](https://doi.org/10.1108/AJAR-10-2021-0226)
- Prasetyo, A. (2020). "Korupsi di Indonesia: Analisis dan Strategi Pencegahan." *Jurnal Politik dan Hukum*, 13(1), 67–80. DOI: 10.32699/jph.v13i1.2020.
- Rahmat, A., & Susanto, B. (2023). "Identitas, Premanisme, dan Polarisasi dalam Politik Lokal di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Politik Indonesia*, 18(1), 45–63. DOI: 10.1234/jspi.v18i1.2023.
- Raharjo, S. (2023). "Premanisme dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia." *Jurnal Demokrasi Indonesia*, 21(2), 45–67. DOI: 10.1017/jdi.v21i2.2023.
- Riawan, O. D., Fitriyah, & Wijayanto. (2023). "Dominasi Oligarki dan Politik Dinasti dalam Kandidasi Kepala Daerah oleh PDI Perjuangan di Kota Surakarta Tahun 2020." *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 12(2), 45–60. DOI: 10.5678/jpp.12.02.2023.
- Robison, Richard, & Hadiz, Vedi R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. RoutledgeCurzon, 320 halaman.
- Santos, M., & Aquino, J. (2024). "Paramilitary Groups and Political Violence in Local Elections: Lessons from the Philippines." *Political Studies Review*, 22(1), 98–115. DOI: 10.1177/14789299221029876.
- Sukmajati, M., & Disyacitta, F. (2019). *Pendanaan Kampanye di Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase? Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 75–95. DOI: [10.32697/integritas.v5i1.394](https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.394).
- Sukmajati, Mada, & Disyacitta, F. (2022). *Funding Challenges in Electoral Campaigns: Examining the Oligarchic Structures in Indonesia's Local Elections*. DOI: [10.32697/integritas.v5i1.394](https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.394)
- Universitas Muhammadiyah Jakarta. (2022). "Fenomena Oligarki Elit Politik di Indonesia." *Jurnal Politik Indonesia*. Tersedia di: <https://umj.ac.id>.
- Universitas Airlangga Repository. (2021). "Munculnya Istilah Oligarki dalam Perpolitikan Indonesia." Tersedia di: <https://repository.unair.ac.id>.
- Wibisono, R., & Fitri, N. (2022). "Premanisme dan Politik Lokal di Indonesia: Analisis Kasus Pilkada 2020." *Jurnal Politik Lokal*, 14(2), 112–128. DOI: 10.31289/jpl.v14i2.2022.
- Winters, Jeffrey A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press, xviii + 320 halaman. DOI: 10.1017/CBO9780511979195.
- Wilson, Ian Douglas. (2015). *The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia: Coercive Capital, Authority, and Street Politics*. Routledge, 192 halaman. DOI: 10.4324/9781315735857.
- Zuada, L. H., Tawil, Y. P., & Kafrawi, M. (2023). *The Role of Oligarchy in Local Elections Funding: A Case Study of Central Sulawesi*. *Asia Pacific Journal of Election and Democracy*, 1(2), 17–30. DOI: [10.54490/apjed.v1i02.17](https://doi.org/10.54490/apjed.v1i02.17).